

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap entitas bisnis yang didirikan umumnya memiliki tujuan yang terstruktur dan terukur. Salah satu tujuan utamanya adalah memperoleh laba secara optimal. Di samping itu, perusahaan juga menetapkan sasaran jangka panjang, yaitu menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta mengupayakan peningkatan kinerja keuangan secara berkelanjutan (Nabilah & Rialdy, 2022). Persaingan dalam dunia bisnis saat ini berkembang dengan cepat dan kuat sehingga mendorong terciptanya persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang ketat. Berkembangnya perekonomian ini mengakibatkan munculnya tuntutan perusahaan untuk terus mengembangkan inovasi, meningkatkan kinerja, dan mengembangkan potensi guna dapat bertahan dan bersaing di dunia bisnis ini (Andriani & Trisnaningsih, 2023).

Kinerja keuangan yang baik dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk memberikan gambaran bagaimana kesuksesan yang telah diraih perusahaan dalam mengoperasikan bisnisnya. Kinerja keuangan dapat dipahami sebagai suatu bentuk evaluasi yang bertujuan untuk menilai sejauh mana perusahaan menjalankan aktivitas operasionalnya sesuai dengan prinsip dan standar keuangan yang berlaku. Selain itu, kinerja keuangan juga merefleksikan capaian atau prestasi yang dihasilkan oleh manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien. Selain itu kinerja keuangan

perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian suatu perusahaan yang dilakukan dengan menganalisis rasio-rasio yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan (Swari & Masdiantini, 2024).

Kinerja keuangan bisa diukur dari analisis laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan yang dilakukan pada setiap periode waktu tertentu (Andriani & Trisnaningsih, 2023). Evaluasi terhadap kinerja perusahaan dapat dilihat dari kemampuannya dalam menghasilkan laba secara optimal. Tingginya laba yang diperoleh mencerminkan potensi pengembalian investasi yang besar bagi investor, sehingga mendorong peningkatan kepercayaan untuk terus menanamkan modalnya dalam jangka panjang (Habibi & Muid, 2024).

Penerapan *good corporate governance* (GCG) memegang peranan krusial dalam mendukung tercapainya kinerja keuangan yang optimal. GCG merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang mengedepankan kepentingan para pemegang saham dan kreditur sebagai penyedia dana eksternal. Penerapan prinsip GCG yang baik akan memberikan jaminan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak para investor dan kreditur, sehingga mereka dapat memperoleh imbal hasil investasi secara adil, efisien, dan tepat waktu. Selain itu, GCG juga memastikan bahwa manajemen menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab demi kemajuan perusahaan. Secara umum, tujuan utama GCG adalah menciptakan nilai tambah melalui peningkatan kualitas kinerja keuangan serta memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan (Rianto & Gantino, 2022).

Good corporate governance jika diterapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Pengimplementasian GCG yang baik dalam suatu perusahaan maka akan mempermudah proses pengambilan suatu keputusan sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan. Berdasarkan pernyataan dari *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), penerapan *good corporate governance* bertujuan untuk membangun nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam aktivitas perusahaan. Nilai tambah yang baik akan diikuti dengan meningkatnya nilai perusahaan yang akan memberikan keuntungan bagi pemegang saham dan pemilik perusahaan (Darniaty dkk., 2023). Dalam prinsipnya, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada pemegang saham maupun kreditur melalui penerapan sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang efektif dan transparan. Pemastian simetrisnya pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan harus berdasarkan kepentingan perusahaan sesuai dengan lima prinsip dasar GCG yaitu transparan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) (Permatasari & Musmini, 2023).

Implementasi praktik *good corporate governance* dalam suatu perusahaan berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perusahaan melalui pengawasan yang lebih efektif terhadap kinerja manajerial serta penguatan aspek akuntabilitas dalam pengambilan keputusan manajemen. Sehingga GCG sangat diperlukan keberadaannya di dalam sebuah perusahaan. Temuan ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh *Asean Corporate*

Governance Association (ACGA) pada tahun 2022, yang mengevaluasi penerapan standar-standar *good corporate governance* di berbagai negara Asia, Indonesia menempati peringkat 12, dimana ini lebih rendah dari negara-negara lain seperti Hongkong, Singapura, Taiwan dan Malaysia (Suryanto & Refianto, 2019). Tingkat penerapan *good corporate governance* (GCG) di Indonesia masih tergolong belum optimal. Meskipun banyak perusahaan yang mulai berupaya menerapkan prinsip-prinsip GCG, implementasinya masih terbatas pada kepatuhan administratif atau formalitas bisnis semata. Dalam praktiknya, penerapan sistem tata kelola tersebut belum sepenuhnya dijalankan secara substansial dan berkelanjutan, melainkan lebih berorientasi pada pemenuhan regulasi yang bersifat normatif (Kesumah, 2022). Kondisi tersebut menegaskan urgensi dilakukannya penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan, sebagai landasan strategis bagi manajemen dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan di mata investor dan pemangku kepentingan lainnya (Mudjib & Setiyono, 2022).

Penelitian ini menggunakan perusahaan telekomunikasi yang didasarkan pada peran strategis yang dimiliki meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan internet membuat perusahaan telekomunikasi mempunyai kontribusi besar dalam penyediaan infrastruktur informasi dan komunikasi kepada sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan pemerintahan (Gustyana dkk., 2022). Pasar industri telekomunikasi terus menerus mengalami pertumbuhan yang signifikan dilihat dari segi jumlah pelanggan maupun *revenue*, hal ini dapat kita lihat pada angka pertumbuhan

industri telekomunikasi sebesar 8,96% pada tahun 2023 (BPS, 2024). Kendati sektor telekomunikasi menunjukkan pertumbuhan yang pesat, sebagian besar perusahaan di industri ini masih menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *good corporate governance* secara optimal. Hasil survei yang dilakukan oleh *Asean Corporate Governance Association* (ACGA) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat implementasi *good corporate governance* pada perusahaan telekomunikasi di Indonesia masih tergolong rendah dan belum memenuhi standar yang diharapkan, kecuali PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk yang pada tahun 2023 mendapatkan kategori “*Very Good*” dalam penerapan GCG nya.

Namun persaingan dalam dunia bisnis saat ini berkembang dengan cepat dan kuat sehingga mendorong terciptanya persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang ketat. Berkembangnya perekonomian ini mengakibatkan munculnya tuntutan perusahaan untuk terus mengembangkan inovasi, meningkatkan kinerja, dan mengembangkan potensi guna dapat bertahan dan bersaing di dunia bisnis ini. Kinerja keuangan dijadikan sebagai tolak ukur untuk memberikan gambaran bagaimana kesuksesan yang telah diraih perusahaan dalam mengoperasikan bisnisnya. Kinerja keuangan bisa diukur dari analisis laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan yang dilakukan pada setiap periode waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan *Return on Assets* (ROA) sebagai indikator untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. ROA dapat menunjukkan kekayaan sesungguhnya dalam perusahaan dan dapat menunjukkan

keuntungan yang baik bagi pemegang saham (Andriani & Trisnaningsih, 2023).

Return on Assets (ROA) dipilih sebagai rasio dalam penelitian ini karena mampu memberikan gambaran kepada investor mengenai efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang digunakan, sehingga mencerminkan tingkat pengembalian atas investasi mereka. Melalui ROA, investor dapat menilai sejauh mana perusahaan mampu memanfaatkan aset yang dimilikinya secara efektif dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini juga mencerminkan upaya perusahaan dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik, karena efisiensi pemanfaatan aset merupakan salah satu tujuan utama dalam praktik *good corporate governance*, terlepas dari seberapa besar profitabilitas penjualan yang dicapai (Sari dkk., 2018). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena lemahnya implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Salah satu fenomena yang mencerminkan hal tersebut adalah kasus yang terjadi pada PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk yang mengalami penurunan laba yang cukup signifikan pada tahun 2022 sebesar 16,19% dimana laba yang dilaporkan pada akhir tahun 2022 adalah sebesar 20,75 triliun rupiah jika dibandingkan dengan laba yang dilaporkan pada akhir tahun 2021 yang mencapai 24,76 triliun rupiah (Riyanto, 2024). Fenomena kedua terjadi pada PT XL Axiata Tbk yang juga mengalami penurunan laba pada tahun 2022. Pada tahun 2021 laba bersih yang dilaporkan adalah sebesar 1,28 triliun rupiah sedangkan pada 2022 laba bersih yang dihasilkan sebesar 1,1 triliun rupiah, turun sebesar 13,85% (Riu dkk., 2024). Fenomena lainnya

terdapat pada PT Centratama Telekomunikasi Tbk yang mengalami penurunan laba di tahun 2020 sebesar 45% yang dimana pada tahun 2019 laba yang dilaporkan adalah sebesar 8,9 miliar rupiah namun di tahun 2020 malah mengalami kerugian sebesar 509,18 miliar rupiah. Lalu di tahun 2024 PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk yang mengalami penurunan laba sebesar 27,3% yang di tahun 2024 melaporkan laba sebesar 84,8 miliar rupiah dibandingkan laba pada tahun 2023 yang sebesar 100,2 miliar rupiah. Berdasarkan fenomena yang dijelaskan penurunan laba dapat menyebabkan penurunan kinerja perusahaan dan menimbulkan kekhawatiran bagi pihak-pihak pemegang saham, dikarenakan semakin sedikit laba yang dihasilkan oleh perusahaan maka pengembalian dana yang diterima juga akan menurun. Penurunan laba berpengaruh terhadap rasio *Return on Asset* (ROA) perusahaan. Sehingga perusahaan membutuhkan usaha yang lebih keras dalam meningkatkan laba serta kinerja perusahaan, laba tercermin dalam kinerja keuangan perusahaan (Sarafina & Saifi, 2017).

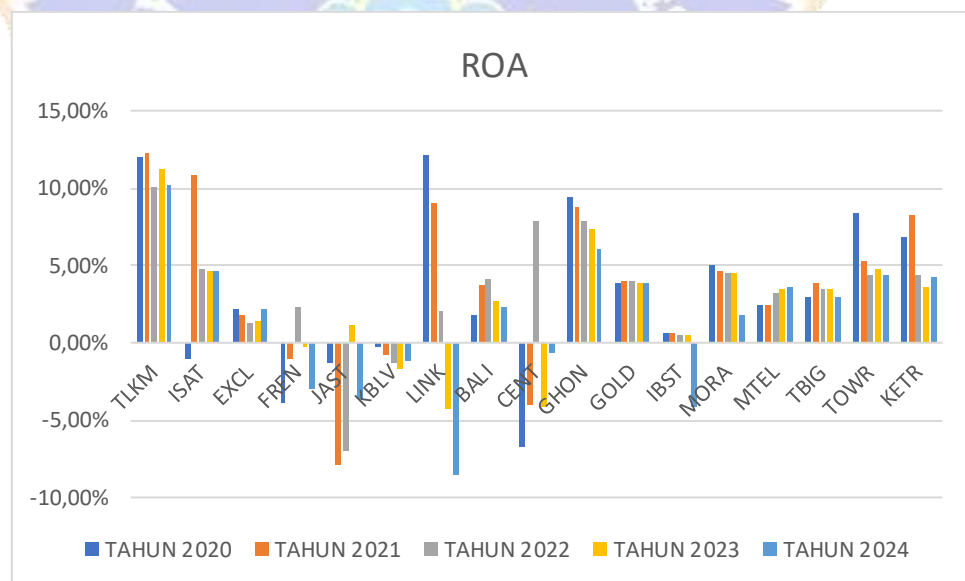
Selain dari fenomena di atas perusahaan-perusahaan lain juga mengalami penurunan laba yang cukup signifikan yang dimana ini mempengaruhi rasio *Return on Asset* (ROA) yang dimana berdasarkan data yang didapat dari laporan keuangan masing-masing perusahaan penurunan laba ini menyebabkan ROA ikut menurun.

Tabel 1.1
Laba Perusahaan Telekomunikasi di Tahun 2020-2024

No.	Kode	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	TLKM	29.563.000.000.000	33.948.000.000.000	27.680.000.000.000	32.208.000.000.000	30.743.000.000.000
2	ISAT	-63.016.000.000	6.860.121.000.000	5.370.203.000.000	4.775.741.000.000	5.272.412.000.000

No.	Kode	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	EXCL	1.519.709.000.000	1.287.807.000.000	1.121.188.000.000	1.284.448.000.000	1.847.631.000.000
4	FREN	-1.523.602.951.388	-435.325.081.365	1.064.305.000.000	-108.952.000.000	-1.294.976.000.000
5	JAST	-1.432.158.168.600	-7.940.186.118.000	10.024.824.912.000	1.583.206.890.000	-5.373.391.051.000
6	KBLV	-21.478.000.000	-34.192.000.000	-61.956.000.000	-17.495.000.000	-11.673.000.000
7	LINK	941.707.000.000	885.319.000.000	240.718.000.000	-532.983.000.000	-1.185.302.000.000
8	BALI	84.403.215.805	188.536.504.140	212.090.007.799	150.502.043.188	144.274.604.948
9	CENT	-509.181.000.000	-314.231.000.000	-214.638.100.000	-844.398.000.000	-177.081.900.000
10	GHON	77.752.839.000	89.855.831.000	90.728.112.000	100.226.779.000	86.401.684.000
11	GOLD	13.159.949.000	14.604.362.000	15.998.575.000	16.198.134.000	16.864.272.000
12	IBST	67.204.167.744	63.351.210.259	41.526.767.474	38.295.115.803	-185.086.300.000
13	MORA	679.677.575.440	671.378.603.195	672.897.955.795	679.171.399.908	262.568.243.694
14	MTEL	601.964.452.000	1.381.071.227.000	1.785.068.000.000	2.010.328.000.000	2.107.671.000.000
15	TBIG	1.066.576.000.000	1.601.353.000.000	1.689.441.000.000	1.621.694.000.000	1.423.035.000.000
16	TOWR	2.853.617.000.000	3.447.875.000.000	3.496.535.000.000	3.303.642.000.000	3.364.606.000.000
17	KETR	68.133.878.506	114.840.531.285	69.956.738.064	77.445.152.264	86.888.523.005

Sumber : Hasil olah data idx.co.id (2025)



Gambar 1.1
ROA Perusahaan Telekomunikasi di Tahun 2020-2024
Sumber : Hasil olah data idx.co.id (2025)

Selain dipengaruhi oleh laba *Return on Asset* (ROA) juga dipengaruhi oleh besarnya jumlah aset perusahaan. Dimana jumlah aset sebuah perusahaan tentunya memiliki nominal yang bisa dikatakan sangat besar, namun jumlah

aset pada suatu perusahaan cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun berikutnya. Sehingga dari data laba dan juga aset pada perusahaan telekomunikasi didapat data ROA pada gambar 1.1. Penurunan kinerja perusahaan akibat adanya penurunan laba dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti keputusan operasional, transparansi laporan keuangan, keputusan manajemen laba. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, peningkatan kinerja perusahaan dapat diupayakan melalui penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Implementasi GCG yang efektif berperan dalam memperbaiki kinerja perusahaan melalui pengawasan terhadap aktivitas manajerial dan penguatan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan (Adi & Suwarti, 2022). Berdasarkan fenomena yang terjadi, peneliti melakukan observasi terhadap laporan keuangan perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rentang waktu 2020 hingga 2024 periode yang merefleksikan terjadinya permasalahan tersebut. Dari hasil pengamatan, diperoleh data bahwa terdapat 17 perusahaan yang secara konsisten menyampaikan laporan keuangan selama lima tahun berturut-turut dalam periode tersebut.

Dewan komisaris independen adalah individu yang duduk dalam jajaran dewan komisaris tanpa memiliki keterkaitan personal maupun profesional dengan anggota komisaris lainnya. Posisi ini diisi oleh pihak yang bukan berasal dari manajemen perusahaan, bukan pemegang saham mayoritas, bukan pejabat pemerintah, serta tidak memiliki relasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan pemegang saham dalam perusahaan yang bersangkutan (Sari dkk., 2018). Dewan komisaris independen merupakan komponen penting

dalam GCG yang berperan sebagai pengawas yang objektif dan bebas dari konflik kepentingan, guna memastikan perusahaan berjalan transparan dan *akuntabel* sesuai dengan prinsip dari *good corporate governance*. Peran dewan komisaris independen dalam pencapaian kinerja keuangan perusahaan sangat strategis, karena mereka memiliki fungsi pengawasan yang mampu mencegah praktik manajerial yang tidak transparan. Keberadaan dewan komisaris independen turut berkontribusi dalam memastikan akuntabilitas dan integritas proses pengambilan keputusan manajemen. Dengan demikian, keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya serta meningkatkan kinerja keuangan dapat tercermin dari efektivitas peran dewan komisaris independen dalam mengurangi potensi konflik kepentingan dan risiko lainnya yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Sari dkk., 2018). Menurut teori keagenan, kehadiran pihak eksternal yang independen dari struktur internal perusahaan dapat meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan oleh dewan komisaris independen ini memungkinkan dewan untuk menjalankan perannya secara objektif dalam mengawasi manajemen, sehingga berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Dalam teori keagenan, dikemukakan bahwa terdapat *asimetri informasi* antara manajemen sebagai *agent* dan para *stakeholder* sebagai *principal*, di mana manajemen cenderung menguasai lebih banyak informasi dibandingkan pihak pemilik kepentingan lainnya (Yuliyanti & Cahyonowati, 2023). Menurut penelitian Solikah (2022), Noviala (2024) yang menjelaskan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sebaliknya, hasil penelitian yang disampaikan oleh Adi (2022) menunjukkan bahwa

keberadaan dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Kepemilikan manajerial merujuk pada kondisi di mana pihak manajemen, khususnya manajer, turut memiliki saham perusahaan, sehingga manajer tersebut berperan ganda sebagai pengelola sekaligus pemegang saham (Sari dkk., 2018). Kepemilikan manajerial merupakan bagian dari *good corporate governance* yang mencerminkan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan sehingga mendorong keselarasan antara kepentingan manajer dan pemegang saham. Adanya peningkatan kepemilikan manajerial menyebabkan kekayaan pribadi manajemen turut meningkat pula. Hal ini akan membuat para manajemen berupaya untuk tetap mempertahankan kekayaannya dan mengurangi segala kemungkinan adanya risiko keuangan perusahaan (Dewi & Diatmika, 2021). Teori keagenan menyatakan bahwa manajer memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan sumber daya perusahaan demi kepentingan pribadi. Situasi ini semakin kompleks akibat adanya pemisahan antara kepemilikan dan fungsi pengawasan dalam perusahaan. Namun, ketika manajer turut memiliki saham, mereka cenderung akan bersikap lebih hati-hati karena turut menanggung risiko atas setiap keputusan yang diambil (Yuliyanti & Cahyonowati, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2023) dan Habibi (2024) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun, temuan tersebut bertolak belakang dengan hasil studi Margaret (2023), yang mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial tidak

memiliki pengaruh signifikan dan justru menunjukkan korelasi negatif terhadap kinerja keuangan.

Kepemilikan Institusional adalah jumlah total saham yang dimiliki organisasi ataupun korporasi, contohnya termasuk lembaga keuangan yaitu bank, perusahaan asuransi, lembaga investasi, serta berbagai entitas lain. (Destrilindo & Rohman, 2024). Kepemilikan institusional adalah komponen *good corporate governance* yang memiliki peran penting demi mencapai prinsip GCG yang transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan. Kepemilikan institusional memainkan peran kunci dalam meredam konflik keagenan yang kerap muncul antara manajer dan pemegang saham. Institusi sebagai pemegang saham mayoritas berperan sebagai mekanisme pengendalian yang dapat menekan perilaku manajerial yang menyimpang. Teori keagenan menyebutkan bahwa peningkatan proporsi kepemilikan institusional akan memperkuat insentif bagi investor institusi untuk menjalankan fungsi pengawasan yang lebih ketat terhadap perilaku manajerial dalam perusahaan. Pengawasan ini berfungsi sebagai penghalang terhadap perilaku *opportunistic* manajer yang dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang (Adi & Suwarti, 2022). Menurut Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan manajerial dan institusional merupakan bagian dari mekanisme *good corporate governance* yang berperan dalam mengendalikan permasalahan keagenan. Investor institusional, dengan karakteristik yang aktif dan profesional, cenderung melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja investasinya dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, tingkat kontrol yang tinggi terhadap manajemen diharapkan mampu meminimalkan potensi

tindakan *oportunistic* yang dapat merugikan perusahaan (Yuliyanti & Cahyonowati, 2023). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adi (2022) dan Margaret (2023) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun, temuan tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Habibi (2024), yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Komite audit merupakan unit kerja yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bersifat independen serta bebas dari intervensi manajemen. Komite ini bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja direksi perusahaan (Noviala dkk., 2024). Komite audit adalah salah satu elemen dalam *good corporate governance* yang bertugas membantu dewan komisaris dalam mengawasi proses pelaporan keuangan, pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan sehingga dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas perusahaan, serta mencegah terjadinya praktik kecurangan atau penyimpangan keuangan. Peningkatan jumlah anggota komite audit berpotensi memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian dalam perusahaan. Variasi dalam latar belakang pendidikan dan kompetensi anggota komite audit dapat memperluas sudut pandang dalam menelaah laporan keuangan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hasil audit yang dihasilkan. Hal ini pada akhirnya akan berpengaruh terhadap akurasi informasi keuangan dan keputusan strategis yang diambil oleh perusahaan (Saputra dkk., 2023). Jumlah rata-rata anggota komite audit pada perusahaan cenderung sama sesuai dengan

ketentuan regulasi namun efektivitas fungsi pengawasan dapat berbeda tergantung pada kualitas, *independensi*, dan kompetensi anggotanya. Teori keagenan menjelaskan bahwa keberadaan jumlah komite yang memadai dinilai mampu memperkuat fungsi pengawasan terhadap manajemen, sehingga dapat menekan biaya keagenan (*agency cost*) dan mendorong peningkatan kinerja perusahaan (Yuliyanti & Cahyonowati, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2023) dan Habibi (2024) menunjukkan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun, temuan tersebut bertolak belakang dengan hasil studi Saputra (2023), yang mengungkapkan bahwa komite audit justru memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

Tinjauan terhadap sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidakkonsistenan temuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan perusahaan, sehingga mencerminkan adanya *research gap*. Inkonsistensi ini menandakan bahwa pengaruh *good corporate governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan masih relevan untuk dikaji lebih lanjut. Setiap elemen dalam struktur GCG seperti dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit menunjukkan kontribusi yang beragam terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, adanya celah penelitian tersebut menjadi landasan bagi penulis untuk mengkaji lebih lanjut sejauh mana implementasi prinsip-prinsip GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini memiliki perbedaan dibandingkan studi-studi sebelumnya, yakni dengan menambahkan variabel kepemilikan institusional yang diadopsi dari beberapa

referensi jurnal, serta melakukan pembaruan pada periode observasi. Jika penelitian terdahulu umumnya mengkaji kepemilikan institusional pada perusahaan perbankan dan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka penelitian ini secara khusus difokuskan pada perusahaan-perusahaan sektor telekomunikasi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini mengusung judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020–2024”.

1.2 Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat sejumlah permasalahan pokok yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Terdapat penurunan laba pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.
2. Tidak semua perusahaan telekomunikasi menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* secara optimal.
3. Terdapat perbedaan temuan dalam sejumlah penelitian sebelumnya mengenai pengaruh variabel dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, serta komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan.

1.3 Pembatasan Masalah

Setiap penelitian secara umum memiliki batasan tertentu yang ditetapkan untuk memperjelas ruang lingkup kajian. Penetapan batasan ini bertujuan agar

proses pengumpulan data menjadi lebih terarah dan efisien, serta membantu peneliti dalam memfokuskan perhatian pada variabel-variabel yang relevan. Dengan demikian, penelitian dapat dilakukan secara lebih sistematis dan menghasilkan temuan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga berdasarkan identifikasi masalah, peneliti memberikan pembatasan masalah lebih lanjut sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan sektor telekomunikasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi penelitian.
2. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rentang waktu selama lima tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024.
3. Penelitian ini membatasi variabel pada aspek *good corporate governance*, yang terdiri atas dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, serta komite audit. Adapun kinerja keuangan perusahaan diukur menggunakan indikator *Return on Assets* (ROA).

1.4 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan?

4. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan
2. Untuk menganalisis apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan
3. Untuk menganalisis apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan
4. Untuk menganalisis apakah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi banyak pihak baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan dan pemahaman penulis terkait permasalahan yang diteliti. Di samping itu, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi dan akuntansi. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas topik *good corporate governance*, terutama yang berfokus pada variabel dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial,

kepemilikan institusional, komite audit, serta kinerja keuangan yang diukur menggunakan *Return on Assets (ROA)*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan Telekomunikasi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan-perusahaan telekomunikasi dalam mengevaluasi efektivitas penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan, serta mendorong optimalisasi pelaksanaannya guna meningkatkan daya saing perusahaan.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para investor sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan investasi pada suatu perusahaan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan kajian lebih lanjut terkait topik serupa, serta memberikan gambaran awal yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui penelitian mendatang dengan pendekatan atau variabel yang lebih luas dan mendalam.